

Judul : Satukan data pemerintah, Baleg godok RUU SDI
Tanggal : Senin, 09 Maret 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Satukan Data Pemerintah Baleg Godok RUU SDI



Darori Wonodipuro

BADAN Legislasi (Baleg) DPR tengah menggodok penyusunan RUU Satu Data Indonesia (SDI) sebagai langkah pembenahan tata kelola informasi nasional. RUU ini diharapkan jadi payung hukum kuat dalam upaya menyelesaikan berbagai konflik agraria di lapangan.

Anggota Baleg DPR Darori Wonodipuro menerangkan, DPR saat ini tengah berupaya menuntaskan konflik agraria. Ada sekitar 30 ribu masalah ketidaksinkronan data yang membuat desa diklaim sebagai kawasan hutan oleh Kementerian Kehutanan, tapi berstatus berbeda menurut Badan Pertanahan Nasional dan Kementerian Transmigrasi.

Perbedaan data itu menunjukkan pentingnya sistem pengelolaan data yang terintegrasi dan akurat. "Dengan kemajuan teknologi seperti pemetaan berbasis satelit, validasi data sebenarnya bisa dilakukan dengan jauh lebih baik jika seluruh pihak bersedia membuka diri melakukan integrasi," katanya.

Darori menilai, RUU SDI perlu mengatur mekanisme sanksi bagi pihak yang menyampaikan data tidak akurat. Kebijakan itu juga harus memberikan penghargaan bagi instansi yang mampu menyajikan data benar dan berkualitas agar tercipta iklim kerja yang sangat profesional. Sanksi dan penghargaan bisa dituangkan juga dalam peraturan.

Kencana penyusunan regulasi ini, sambung Darori, juga sejalan dengan implementasi Kebijakan Satu Peta atau *one map policy* yang hingga kini masih menghadapi tantangan besar. Saat ini kebijakan itu baru sepenuhnya diterapkan pada satu wilayah pulau saja, yakni Sulawesi.

Dengan kondisi itu, proses penyatuan peta nasional masih membutuhkan waktu panjang agar mencapai hasil yang maksimal bagi pembangunan. Karena itu, upaya itu harus terus didorong agar mencegah tumpang tindih kebijakan tata ruang dan konflik pemanfaatan lahan daerah.

Darori mencontohkan sejumlah

wilayah seperti Bandung Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara yang memiliki lahan milik masyarakat namun sebenarnya berfungsi sebagai kawasan lindung. "Kondisi itu kerap tidak tercermin dalam tata ruang karena berada di luar kawasan hutan nasional," ungkapnya.

Fungsi ekologis kawasan itu lanjutnya, untuk menjaga keseimbangan lingkungan agar terhindar dari bencana. Ketidaktepatan pengelolaan kawasan pada akhirnya bisa memicu berbagai bencana alam seperti banjir, serta kerusakan lingkungan yang sangat merugikan penduduk di sekitar.

Pada dasarnya, lahan milik masyarakat memiliki fungsi lindung, tapi belum diatur dengan baik dalam tata ruang daerah. "Karena berada di luar kawasan hutan, lahan itu akhirnya dianggap bebas digunakan, misalnya untuk perkebunan sawit secara luas dan masif," tuturnya.

Baleg DPR berharap, integrasi data nasional dapat mempercepat penyelesaian konflik agraria sekaligus memperbaiki kebijakan tata ruang. Dengan data akurat, Pemerintah mampu mencegah reruarganya berbagai bencana alam di sejumlah daerah, termasuk Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.

Sejalan dengan itu, anggota Baleg Nyongan Parta menegaskan, pembangunan tanpa dituntun data akurat berisiko melahirkan kebijakan salah arah dan tidak tepat sasaran. Dengan demikian, kebijakan justru merugikan rakyat dan bahkan menghambat efisiensi anggaran negara.

Persoalan di hulu, menurut Parta, adalah karena data yang lemah serta ego sektoral antar kementerian dan lembaga yang membuat data tidak sinkron. Akibatnya rakyat dirugikan dan pengeluaran negara jadi tidak efisien karena data yang digunakan tidak valid atau tak tertutup kemungkinan justru salah.

Parta mengingatkan sejumlah kasus yang jadi cermin rapuhnya sistem pendataan selama ini. Salah satunya adalah penghapusan penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan yang ternyata masih menjalani perawatan rutin seperti cuci darah, penyakit jantung, hingga diabetes di beberapa daerah.

RUU SDI yang diinisiasi parlemen diharapkan bisa berguna memastikan integrasi, akurasi, dan sinkronisasi data lintas kementerian dan lembaga. Semoga ke depan tidak ada lagi rakyat yang menjadi korban karena lemahnya data. "Negara harus hadir dengan kebijakan yang berbasis data yang benar," ucapnya. ■ PVB